

KETERGANTUNGAN FISKAL DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DI KABUPATEN JEMBER

Desi Nurlaily¹⁾, Alexsa Belva Sepdiana A. W.²⁾, Eva Hany Fanida³⁾, Revienda Anita Fitrie⁴⁾

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

Correspondence author: D Nurlaily, 25040674200@mhs.unesa.ac.id, Surabaya, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the level of fiscal dependence of the Jember Regency Government on central government transfer funds within the Regional Budget (APBD) for the 2020–2022 period. This study uses a quantitative descriptive approach utilizing secondary data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and official regional government documents. The analysis technique was conducted by measuring the fiscal dependence ratio, fiscal independence ratio, and degree of fiscal decentralization. The results indicate that Jember Regency's fiscal dependence is very high, as evidenced by the dominance of transfer funds in the regional revenue structure, with a ratio exceeding 70%. Conversely, the fiscal independence ratio is low, indicating that Regional Original Revenue (PAD) as the primary source of regional financing is not yet optimal. The degree of fiscal decentralization also shows suboptimal conditions, reflected in the low contribution of PAD to total regional revenue. These findings indicate that regional fiscal capacity to support the implementation of regional autonomy is still limited. Therefore, a strategy is needed to optimize PAD by increasing the effectiveness of regional tax and levy collection and by developing local economic potential to enhance regional fiscal independence.

Keyword : fiscal dependence, fiscal independence, fiscal decentralization, regional revenue, central transfers

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Jember terhadap dana transfer pemerintah pusat dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode 2020–2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta dokumen resmi pemerintah daerah. Teknik analisis dilakukan melalui pengukuran rasio ketergantungan fiskal, rasio kemandirian fiskal, dan derajat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Jember tergolong sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah dengan rasio di atas 70%. Sebaliknya, rasio kemandirian fiskal berada pada kategori rendah, yang mengindikasikan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal sebagai sumber utama pembiayaan daerah. Selain itu, derajat desentralisasi fiskal juga menunjukkan kondisi yang belum optimal, tercermin dari rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa

kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan strategi optimalisasi PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci : ketergantungan fiskal, kemandirian fiskal, desentralisasi fiskal, pendapatan daerah, transfer pusat

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah secara mandiri. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan melalui pemanfaatan sumber pendapatan yang dimiliki (Safitri & Alfath, 2025). Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, kemampuan fiskal setiap daerah berbeda-beda karena dipengaruhi oleh potensi ekonomi, kapasitas pengelolaan keuangan, serta efektivitas pemungutan pendapatan daerah (Dame et al., 2025).

Keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat berbagai sumber penerimaan daerah. Pendapatan daerah umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta sumber pendapatan lain yang sah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya pemerintah daerah (Shobiha et al., 2025). Proporsi masing-masing sumber pendapatan tersebut dapat menunjukkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Jika kontribusi PAD relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, maka daerah tersebut cenderung memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi. Tingkat ketergantungan fiskal ini dapat dilihat dari besarnya proporsi dana

transfer terhadap total pendapatan daerah (Fadhilla et al., 2025).

Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur juga memiliki struktur pendapatan yang tercermin dalam dokumen APBD. Struktur pendapatan tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri (Setianda et al., 2025). Analisis terhadap komposisi pendapatan daerah menjadi penting untuk memahami tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, karena kemandirian fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri (Saragih & Nurlinda, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Jember terhadap dana transfer pemerintah pusat melalui pengkajian struktur pendapatan daerah dalam APBD. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio keuangan daerah (Wulandari & Lathifah, 2025) untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah terhadap total pendapatan pemerintah daerah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menganalisis tingkat ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten Jember terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai kondisi keuangan daerah

berdasarkan data yang bersifat numerik (Creswell & Creswell, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember selama periode tahun 2020–2022. Data yang dianalisis meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer pemerintah pusat, serta total pendapatan daerah. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen laporan keuangan daerah yang relevan dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah, yang meliputi rasio ketergantungan fiskal dan rasio kemandirian fiskal. Rasio ketergantungan fiskal digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sedangkan rasio kemandirian fiskal digunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri (Hartoto et al., 2025).

Hasil perhitungan rasio kemudian dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan nilai rasio antar tahun anggaran untuk mengetahui pola dan tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Jember.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Ketergantungan Fiskal

Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2020–2022, dapat diketahui bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah mencapai Rp3,53 triliun, dengan kontribusi dana transfer sebesar Rp2,75 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) hanya sebesar Rp593 miliar. Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2021, di mana total pendapatan meningkat menjadi Rp3,67 triliun dengan dana transfer sebesar Rp2,73 triliun dan PAD sebesar Rp719 miliar. Pada tahun 2022, total pendapatan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp3,81 triliun, dengan dana transfer mencapai Rp3,05 triliun dan PAD sebesar Rp734 miliar.

Rasio ketergantungan fiskal dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 1. Klasifikasi Ketergantungan Fiskal

No	Nilai KF (%)	Keterangan
1	< 10.00	Sangat Rendah
2	10.00 – 20.00	Rendah
3	20.00 – 30.00	Cukup
4	30.00 – 40.00	Sedang
5	40.00 – 50.00	Tinggi
6	> 50.00	Sangat Tinggi

Komposisi tersebut mengaku bahwa kontribusi dana transfer terhadap total pendapatan daerah jauh lebih besar dibandingkan PAD, sehingga sumber utama pendapatan Kabupaten Jember masih bergantung pada pemerintah pusat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan internal masih terbatas, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer tetap tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan konsep hubungan keuangan pusat dan daerah yang menekankan adanya perimbangan keuangan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Kurniawan, 2025).

Berdasarkan perhitungan data dengan rumus, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Ketergantungan Fiskal Kab. Jember

Tahun	KF (%)	Keterangan
2020	77.90	Sangat Tinggi
2021	74.39	Sangat Tinggi
2022	80.05	Sangat Tinggi

Jika dianalisis menggunakan rasio ketergantungan fiskal, diperoleh bahwa pada

tahun 2020 tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Jember berada pada kisaran 77,9%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 74,4%, namun kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi sekitar 80,1%. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi karena berada di atas 50%. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Hasil ini sejalan dengan pendapat (Saragih & Nurlinda, 2023) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi dana transfer terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah terhadap pemerintah pusat.

Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio kemandirian fiskal dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Rasio KKD} = x \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan pinjaman}} 100 \%$$

Berdasarkan perhitungan data dengan rumus, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. Kemandirian Fiskal Kab. Jember

Tahun	KKD (%)
2020	21.56
2021	26.33
2022	24.06

Di sisi lain, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Jember menunjukkan tingkat yang masih relatif rendah. Pada tahun 2020, rasio kemandirian fiskal berada pada kisaran 21,6%, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sekitar 26,3%, namun kembali menurun pada tahun 2022 menjadi sekitar 24,1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri masih terbatas. Rendahnya rasio ini disebabkan oleh kontribusi PAD yang masih lebih kecil dibandingkan dengan dana transfer. Dengan demikian, fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan juga masih dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kemandirian

keuangan daerah ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan (Saragih & Nurlinda, 2023).

Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi fiskal dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{DDF} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total PAD tahun t

TPDt = Total Penerimaan Daerah tahun t

Berdasarkan perhitungan data dengan rumus, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Jember

Tahun	PADt	TPDt	DDF (%)
2020	593 miliar	3.530 miliar	16.80
2021	719 miliar	3.670 miliar	19,59
2022	734 miliar	3.810 miliar	19.25

Selanjutnya, derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Jember juga menunjukkan kondisi yang belum optimal. Berdasarkan hasil perhitungan, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar 16,8%, meningkat menjadi 19,6% pada tahun 2021, dan sedikit menurun menjadi 19,3% pada tahun 2022. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih tergolong rendah (di bawah 20%), sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kabupaten Jember belum berjalan secara maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan publik secara mandiri masih terbatas dan masih sangat bergantung pada dukungan dana dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Jember masih memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang sangat tinggi, tingkat kemandirian fiskal yang rendah, serta

derajat desentralisasi fiskal yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dalam meningkatkan PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, seperti peningkatan pelayanan pajak daerah, digitalisasi sistem pembayaran, serta optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah, merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hikmah et al., 2024) yang menyatakan bahwa optimalisasi sistem anggaran daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penguatan manajemen keuangan daerah yang transparan dan akuntabel juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja fiskal daerah (Mozin et al., 2025).

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Jember terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tergolong sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya rasio ketergantungan fiskal yang berada di atas 70% selama periode tahun 2020–2022. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer pemerintah pusat.,

Di sisi lain, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Jember menunjukkan nilai yang relatif rendah, yang mencerminkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri masih

terbatas. Hal ini disebabkan oleh kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih lebih kecil dibandingkan dengan dana transfer. Selain itu, derajat desentralisasi fiskal juga menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih berada pada kategori rendah, sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal belum berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah daerah telah diberikan kewenangan melalui kebijakan otonomi daerah, kemampuan fiskal Kabupaten Jember dalam mengelola keuangan secara mandiri masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi PAD melalui peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California : Sage Publication Inc.
- Dame, M. D., Rengga, A., & Meylano, N. H. (2025). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan di BAPPERIDA. *JRPP : Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 1693–1705. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.42090>
- Fadhilla, R. N., Nissa, D. N. F., & Putri, M. A. (2025). Menakar Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus Ketergantungan Fiskal Kabupaten Magelang 2020–2024. *KEUDA : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 10(2), 129–143. <https://doi.org/10.52062/keuda.v10i2.4746>
- Hartoto, Andriani, A. F., Andriana, N., Nurkhamid, M., Yustiani, S., Rakhmawati, I., Sriyani, Aprilia, R.,

- Sunyoto, E., Astuti, E., Kurniawati, L., & Ambarwati, R. D. (2025). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Teori dan Praktik)*. Bandung: Widina Media Utama.
- Hikmah, T. N., Gratia, T. B. N., Putri, F. N., & Fahrezi, S. E. (2024). Optimalisasi Sistem Anggaran Daerah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *IJEMA : Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*, 1(12), 1357–1362. <https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/920>
- Kurniawan, I. (2025). Ketergantungan Transfer dan Kemunduran Otonomi Fiskal Daerah: Sebuah Analisis Struktural. *BALANCE : Journal of Finance Accounting and Taxation*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.64779/xn46t328>
- Mozin, S. Y., Abdussamad, S. N., & Saputra, I. N. A. (2025). Peran Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah: Tinjauan Systematic Literature Review. *Journal of Governance and Public Administration*, 3(1), 128–138. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.3316>
- Safitri, R., & Alfath, T. P. (2025). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Perspektif Sistem Keuangan Publik Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 808–815. <https://doi.org/10.55357/is.v6i3.1073>
- Saragih, R., & Nurlinda. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. *Liabilities : Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14810.g9884>
- Setianda, R. A., Suwarno, T. E., Abdillah, M. R., Hadiani, Y., Laoli, V., Pulungan, F. F., Muthmainnah, R., & Sinaga, A. S. (2025). Analisis Sumber-Sumber Menata APBD, Membangun Daerah: Menuju Kemandirian Fiskal Melalui Efisiensi Anggaran Serta Investasi Infrastruktur Pada Kabupaten Tanah Laut. *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 5(1), 48–54. <https://doi.org/10.47709/jap.v5i1.6215>
- Shobiha, T. D., Zuhroh, D., Wasesa, T., Sutini, S., & Wiratna, W. (2025). Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap Peningkatan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022. *JUMMA '45: Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 867–884. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i1.4973>
- Wulandari, I., & Lathifah, N. (2025). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020-2024). *JEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 195–202. <https://doi.org/10.53916/jeb.v19i3.115>